

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri Perkebunan di Indonesia untuk saat ini tidak terlepas dari adanya sejarah panjang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Perkembangan industri Perkebunan juga erat kaitannya dengan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Adanya kapitalisme agraris bangsa Eropa yang diperkenalkan oleh sistem perekonomian kolonial menjadi faktor munculnya perkebunan-perkebunan yang ada di tanah jajahan. Sistem perkebunan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial ataupun yang didirikan oleh korporasi kapitalis asing merupakan sebuah adaptasi dari sistem perkebunan Eropa (European Plantation). Sistem perkebunan bisa dikatakan sebagai sistem perekonomian baru dalam ranah pertanian. Sistem ini telah membawa perubahan serta dampak penting terhadap kehidupan masyarakat di tanah jajahan.

Gerakan kolonialisme yang didorong oleh perkembangan kapitalisme agraris Barat menganggap tanah di wilayah jajahan sebagai sumber utama kekayaan bagi negara induknya. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta upah tenaga kerja yang murah di wilayah jajahan memungkinkan eksploitasi produksi pertanian yang menguntungkan pasar global. Dalam konteks ini, sistem perkebunan dianggap sebagai metode yang sesuai untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penerapan sistem perkebunan dimulai dengan mengimpor

investasi dan teknologi dari luar wilayah, sambil memanfaatkan tanah dan tenaga kerja yang tersedia di wilayah jajahan (Kartodirdjo dan Djoko, 1991: 7).

Tahun 1870 menjadi titik balik signifikan dalam pemerintahan kolonial Belanda. Setelah bertahun-tahun menguasai sepenuhnya eksploitasi sektor pertanian, "kebijakan pintu terbuka" mulai diterapkan untuk mendorong investasi asing, yang diresmikan dalam Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Meskipun dampaknya hanya berlaku di wilayah yang berada di bawah kendali langsung Belanda, seperti Pulau Jawa, tetapi semangat kebebasan berusaha ini juga memiliki pengaruh umum pada pantai timur Sumatera. Di wilayah ini, yang memiliki otonomi pemerintahan sendiri, penguasa lokal cenderung lebih mementingkan memberikan izin jangka panjang (yang legalitasnya diragukan) kepada perusahaan asing dari pada pemerintah Hindia Belanda (Stoler, 2005: 26).

Perkembangan sejarah perkebunan di kawasan Sumatera Timur dalam skala korporasi tidak terlepas dari peran seorang Said bin Abdullah bin Umar Bilsagih yang merupakan seorang keturunan Arab asal Surabaya. Dari pengalamannya dalam perjalanan yang pernah dilaluinya ke Labuhan di Tanah Deli, Said menceritakan kepada mitra bisnisnya yang bernama Nienhuis bahwa ada tembakau yang berkualitas tinggi dibudidayakan oleh masyarakat Deli. Said kemudian mengajak mitra dagangnya untuk pergi bersama melakukan survei terhadap penanaman tembakau yang ada di Sumatra Timur (Ghani, 2019: 39). Pada tahun 1863, J. Nienhuis tiba di Deli dengan niat khusus untuk memulai usaha di wilayah yang belum banyak diketahui oleh Belanda pada saat itu. Dia menjadi pelopor dalam pengembangan budaya tembakau yang kemudian

menjadikan pantai timur Sumatera dikenal secara internasional. Perusahaan yang dia dirikan kemudian tumbuh menjadi salah satu perusahaan perkebunan kolonial terbesar (Breman, 1997: 16).

Di Sumatera Timur, para pengusaha asing berlomba-lomba untuk membuka lahan perkebunan tembakau daripada membeli dari pedagang lokal. Hal ini tentu saja terkait dengan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Upaya Nienhuis tersebutlah yang menjadi pembuka jalan para pengusaha Barat untuk menanamkan modalnya di Sumatera Timur.

Menurut Stoler (2005) di tanah Deli, pada saat itu Belanda tidak dapat atau tidak ingin mengalokasikan pasukan dan dana yang diperlukan. Para pengusaha perkebunan Eropa diberikan sementara kebebasan untuk mengatur dan melindungi kepentingan mereka sendiri dalam usaha untuk memperkuat kepentingan Belanda. Pada awalnya, dianggap bahwa tindakan ini akan mendukung kepentingan Belanda. Namun, kemudian diketahui bahwa kepentingan-kepentingan ini tidak selalu sejalan, terutama ketika pelanggaran hak atas tanah oleh pengusaha perkebunan mengancam eksistensi masyarakat adat. Pemerintah kolonial menyadari bahwa langkah-langkah ini bisa berpotensi berbahaya, yaitu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pekebun untuk mendorong investasi, namun dengan harapan tetap menjaga ketenangan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, semakin lama kawasan Deli yang sebelumnya masih berupa hutan belantara kini telah bertransformasi menjadi kawasan industri perkebunan. Di bukanya perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut berdampak

pada meningkatnya jumlah penduduk. Hal tersebut sangat wajar karena pembukaan lahan perkebunan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Migrasi penduduk yang di datangkan oleh para pengusaha perkebunan di maksudkan untuk dipekerjakan di lahan-lahan perkebunan. Kehidupan para buruh ataupun kuli-kuli kontrak di Deli sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para pengusaha perkebunan. Kehidupan di lingkungan perkebunan yang sangat keras menjadi salah satu alasan bagi para buruh untuk melarikan diri. Resiko yang besar bisa saja ditanggung oleh para kuli kontrak yang nekat untuk melarikan diri dan apabila ketahuan akan mendapatkan hukuman yang berat. Realita yang terjadi sering kali para kuli-kuli kontrak tersebut melakukan pemberontakan terhadap para pengusaha perkebunan akibat tindakan yang merugikan para kuli kontrak.

Bertambahnya jumlah kuli-kuli kontrak dan pekerja migran yang memasuki Deli, membuat manajemen dan peraturan akan tenaga kerja menjadi semakin penting. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan J.T. Cremer, dibentuk sebuah asosiasi pengusaha di bidang perkebunan yang disebut Deli Planters Vereeniging (DPV). Asosiasi ini secara khusus ditujukan untuk pengusaha tembakau di Deli. Tujuan pembentukan DPV adalah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai ketentuan terkait dengan sektor perkebunan, terutama dalam hal pekerja kontrak. Alasan utama pembentukan asosiasi ini adalah mengelola tenaga kerja di perkebunan. DPV resmi didirikan pada tahun 1879. Pada saat itu, perhatian besar diberikan kepada isu pekerja kontrak, yang sering kali mencerminkan kondisi kerja yang mirip dengan perbudakan atau kerja paksa.

Oleh karena itu, setiap pengusaha perkebunan tembakau dilarang untuk menginformasikan atau mempublikasikan keadaan kerja pegawai atau orang-orang yang terkait dengan pekerja kontrak, atau menyebarkannya dalam bentuk tulisan tanpa persetujuan DPV. Dalam hal ini, peran utama DPV adalah bukan hanya untuk menghindari liputan negatif tentang buruh perkebunan tembakau, melainkan untuk memantau ketat implementasi ketentuan yang telah ditetapkan dan memberlakukan sanksi kepada anggotanya yang melanggar (Damanik, 2016:357).

Penelitian tentang DPV sebagai asosiasi pengusaha perkebunan di tanah Deli masa kolonial menjadi penting karena perannya dalam sejarah perkembangan perkebunan di wilayah ini. DPV tidak hanya berperan dalam melindungi kepentingan pengusaha perkebunan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pengaturan tenaga kerja, dan perkembangan perkebunan di Tanah Deli. Meskipun DPV memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan perkebunan di Tanah Deli, penelitian yang mendalam tentang organisasi ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran, pengaruh, dan dampak DPV sebagai asosiasi pengusaha perkebunan di tanah Deli masa kolonial.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: *“Deli Planters Vereeniging di tanah Deli Masa Kolonial”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Pengaruh kebijakan politik “Pintu terbuka” melalui undang-undang agraria tahun 1870 terhadap perkembangan industri Perkebunan di tanah Deli.
2. Pengaruh pemberian tanah konsesi dari kesultanan Deli kepada para pengusaha perkebunan terhadap hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan di tanah Deli.
3. Konflik dan isu sosial antara pengusaha perkebunan dan buruh selama masa kolonial.
4. Latar belakang pembentukan Deli Planters Vereeniging sebagai asosiasi pengusaha perkebunan di Tanah Deli pada masa kolonial
5. Hubungan antara Deli Planters Vereeniging dengan pemerintah kolonial, pemerintah kesultanan Deli dan Para buruh perkebunan
6. Perkembangan organisasi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Deli Planters Vereeniging di tanah Deli selama masa kolonial

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ranah dan cakupan penelitian agar tidak terlalu melebar di luar ranah pembahasan, maka peneliti membuat batasan penelitian. Penelitian ini tentunya akan fokus terhadap pembahasan mengenai kehadiran para pengusaha perkebunan di tanah Deli yang tergabung di dalam suatu wadah perkumpulan yang bernama Deli Planters Vereeniging. Penelitian ini akan mengidentifikasi kaitan hubungan antara organisasi Deli Planters Vereeniging dengan pemerintah kolonial, pemerintah kesultanan Deli dan Para buruh perkebunan di tanah Deli.

Dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana organisasi ini terbentuk, tujuan pendiriannya serta kebijakan-kebijakan yang diterapkannya di tanah Deli, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh organisasi pengusaha perkebunan terhadap transformasi ekonomi, politik dan sosial di tanah Deli pada periode kolonial.

1.4. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang permasalahan sebelumnya tentang Deli Planters Vereeniging sebagai asosiasi pengusaha perkebunan di Tanah Deli masa kolonial:

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan pembentukan Deli Planters Vereeniging sebagai organisasi pengusaha perkebunan di Tanah Deli pada masa kolonial?
2. Bagaimana perkembangan organisasi dan kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan oleh Deli Planters Vereeniging di tanah Deli selama masa kolonial?
3. Bagaimana kaitan hubungan antara Deli Planters Vereeniging dengan pemerintah kolonial, pemerintah kesultanan Deli dan Para buruh perkebunan di tanah Deli ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dalam penelitian yang berjudul "*Deli Planters Vereeniging Di Tanah Deli Masa Kolonial*":

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan pembentukan Deli Planters Vereeniging sebagai organisasi pengusaha perkebunan di Tanah Deli pada masa kolonial.
2. Untuk mengetahui kaitan hubungan antara Deli Planters Vereeniging dengan pemerintah kolonial, pemerintah kesultanan Deli dan Para buruh perkebunan di tanah Deli.
3. Untuk mengetahui perkembangan organisasi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Deli Planters Vereeniging di tanah Deli selama masa kolonial.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "*Deli Planters Vereeniging Di Tanah Deli Masa Kolonial*" dapat memberikan sejumlah manfaat yang penting, baik secara akademis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari penelitian ini:

1. Melalui hasil penelitian ini tentunya akan menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kajian sejarah perkebunan di Sumatera timur khususnya Deli Planters Vereeniging Sebagai Organisasi Pengusaha Perkebunan Di Tanah Deli Masa Kolonial.

2. Melalui hasil penelitian ini tentunya akan menambah kajian ilmu sejarah khususnya dengan tema sejarah perkebunan dan sejarah kolonialisme di tanah Deli.
3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca secara umum ataupun bagi kalangan akademisi seperti mahasiswa dalam mengetahui adanya Deli Planters Vereeniging Sebagai Asosiasi Pengusaha Perkebunan Di Tanah Deli Masa Kolonial.
4. Menjadi referensi dan sumber informasi tambahan bagi para pembaca ataupun peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian penulis ataupun penelitian-penelitian terkait yang memiliki relevansi.

